



DIALEKTIKA ENS POLITICON DAN ENS RATIONALE DI HADAPAN KEMEROSOTAN ETIS-RASIONAL

Antonius Kapitan

Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Email Korespondensi: kapitananton4@gmail.com

Received: August 7, 2025

Accepted: September 5, 2025

Published: October 20, 2025

Abstract

This article examines the concepts of ens politicon and ens rationale in the context of contemporary ethical-rational decline. Through an analytical-philosophical approach, this research explores how humans, as political beings (ens politicon) and rational beings (ens rationale), face the challenges of moral degradation and the decline of rationality in the modern era. The analysis reveals that the decline of ethical rationality is manifested in various phenomena, including post-truth politics, social polarization, and a crisis of institutional legitimacy. It appears that reconciliation between the political and rational dimensions of humankind is crucial in overcoming this crisis. Therefore, an integrative approach that combines practical wisdom (phronesis) with democratic deliberation can provide a way out of ethical-rational decline. The development of critical capacity is absolutely necessary as a foundation for restoring a rational and ethical ethos in contemporary political life.

Keywords: *ens politicon, ens rationale, dialectics, rationality crisis, ethical rational.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ens politicon dan ens rationale dalam konteks kemerosotan etis-rasional kontemporer. Melalui pendekatan analitis-filosofis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana manusia sebagai makhluk politik (ens politicon) dan makhluk rasional (ens rationale) menghadapi tantangan degradasi moral dan kemunduran rasionalitas dalam era modern. Analisis menunjukkan bahwa kemerosotan etis-rasional termanifestasi dalam berbagai fenomena seperti post-truth politics, polarisasi sosial, dan krisis legitimasi institusional. Nampak bahwa rekonsiliasi antara dimensi politik dan rasional manusia menjadi krusial dalam mengatasi krisis ini. Karena itu pendekatan integratif yang menggabungkan kebijaksanaan praktis (phronesis) dengan deliberasi demokratis dapat memberikan jalan keluar dari kemerosotan etis-rasional. Mutlak diperlukan pengembangan kapasitas kritis sebagai fondasi pemulihan etos rasional-etis dalam kehidupan politik kontemporer.

Kata Kunci: ens politicon, ens rasional, dialetika, krisis, rasional, etis-rasional.



A. Pendahuluan

Krisis kontemporer yang melanda peradaban modern tidak hanya berdimensi ekonomi atau politik, tetapi lebih fundamental lagi, yakni krisis yang menyentuh hakikat manusia sebagai makhluk rasional dan politik. Konsep klasik tentang manusia sebagai *ens rationale* (makhluk rasional) dan *ens politicon* (makhluk politik) yang telah menjadi fondasi pemikiran Barat sejak Aristoteles, kini menghadapi tantangan serius di tengah fenomena yang dapat disebut sebagai kemerosotan etis-rasional. Kemerosotan etis-rasional ini termanifestasi dalam berbagai gejala kontemporer, misalnya, merebaknya politik *post-truth* yang mengabaikan fakta objektif, polarisasi ekstrem yang menghancurkan dialog rasional, serta erosi kepercayaan terhadap institusi-institusi yang seharusnya menjadi penjaga rasionalitas publik.¹ Dalam konteks ini, pertanyaan fundamental yang muncul adalah: bagaimana manusia dapat mempertahankan esensinya sebagai makhluk rasional sekaligus makhluk politik ketika kedua dimensi ini tampak saling bertentangan?

Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang secara alamiah bersifat politik (*zoon politikon*), namun sekaligus juga makhluk yang memiliki kapasitas rasional (*logos*) yang membedakannya dari makhluk lain.² Paradoks muncul, ketika dimensi politik, yang seharusnya menjadi arena aktualisasi kebijaksanaan praktis (*phronesis*), justru menjadi ruang degradasi rasionalitas dan moralitas.

Hannah Arendt dalam analisisnya tentang kondisi manusia modern mengidentifikasi bahwa krisis politik kontemporer bersumber pada hilangnya ruang publik (*public sphere*) sebagai arena dialog rasional dan tindakan bermakna.³ Sementara itu, Jürgen Habermas melalui teori tindakan komunikatifnya menunjukkan bagaimana rasionalitas komunikatif menjadi prasyarat bagi legitimasi politik yang sehat.⁴

Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam dialektika antara *ens politicon* dan *ens rationale* dalam menghadapi tantangan kemerosotan etis-rasional. Melalui pendekatan filosofis analitis, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua dimensi fundamental manusia ini dapat direkonsiliasikan untuk mengatasi krisis kontemporer. Urgensi penelitian ini terletak pada kondisi kritis peradaban modern yang membutuhkan refleksi filosofis mendalam tentang hakikat manusia dan kehidupan politiknya. Tanpa pemahaman yang jernih tentang relasi antara rasionalitas dan politik, upaya mengatasi berbagai krisis kontemporer akan tetap bersifat superfisial dan parsial.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode analitis-filosofis dengan pendekatan hermeneutik untuk menginterpretasi teks-teks filosofis klasik dan kontemporer terkait konsep *ens politicon* dan *ens rationale*. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian filosofis yang bersifat konseptual dan interpretatif.⁵

Langkah-langkah metodologis yang ditempuh meliputi: pertama, analisis konseptual terhadap gagasan *ens politicon* dan *ens rationale* dalam tradisi filosofis Barat, mulai dari Aristoteles hingga pemikir kontemporer. Kedua, identifikasi manifestasi kemerosotan etis-rasional dalam fenomena politik kontemporer melalui analisis kritis terhadap berbagai literatur

¹Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958): 58-67.

²Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009): 1097b-1098a.

³Arendt, *The Human Condition*: 175-181.

⁴Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, vol. 1* (Boston: Beacon Press, 1984): 285-287.

⁵F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009): 25-30.

filosofis dan sosiologis. Ketiga, eksplorasi kemungkinan sintesis atau rekonsiliasi antara dimensi politik dan rasional manusia sebagai respons terhadap krisis tersebut.

Sumber data primer penelitian ini adalah teks-teks filosofis klasik dan modern, terutama karya Aristoteles, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, John Rawls, dan Alasdair MacIntyre. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal filosofis dan analisis kritik terhadap fenomena politik kontemporer dari perspektif filosofis. Berbagai referensi ini dibaca lalu dilakukan analisis mendalam melalui interpretasi hermeneutik yang memperhatikan konteks historis dan konseptual dari setiap pemikiran yang dikaji. Pendekatan dialektis digunakan untuk mengidentifikasi titik temu dan titik tumpang antara berbagai perspektif filosofis yang dikaji.

C. Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi *Ens Politicon* dalam Tradisi Filosofis

Konsep *ens politicon* memiliki akar yang mendalam dalam tradisi filosofis Barat, dimulai dari refleksi Aristoteles tentang manusia sebagai *zoon politikon*. Dalam *Politics*, Aristoteles menegaskan bahwa manusia secara alamiah adalah makhluk politik, bukan dalam pengertian yang bersifat reduksionis, tetapi dalam makna yang lebih fundamental: manusia mencapai aktualisasi penuh kemanusiaannya hanya melalui partisipasi dalam komunitas politik (*polis*).⁶

Dimensi politik manusia ini bukan sekadar kebutuhan praktis untuk hidup bermasyarakat, tetapi merupakan kondisi eksistensial yang memungkinkan manusia mengembangkan kebijaksanaan praktis (*phronesis*) dan mencapai kehidupan yang baik (*eudaimonia*). Dalam konteks ini, politik tidak dipahami sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan sebagai ruang aktualisasi keunggulan moral (*arete*) melalui deliberasi dan tindakan bersama.⁷

Hannah Arendt memperdalam pemahaman tersebut dengan membedakan antara *labor*, *work*, dan *action* dalam kondisi manusia. *Action* (tindakan) merupakan aktivitas politik par excellence yang memungkinkan manusia tampil sebagai individu unik di hadapan sesama dalam ruang publik.⁸ Bagi Arendt, politik adalah ruang kemunculan (*space of appearance*) di mana manusia mengaktualisasikan kebebasannya melalui kata dan perbuatan. Namun, Arendt juga mengidentifikasi bahwa modernitas telah mengalami degradasi politik melalui reduksi ruang publik menjadi ruang sosial yang didominasi oleh kepentingan privat dan kalkulasi ekonomis.⁹ Fenomena ini mengakibatkan hilangnya kualitas politik yang sejati, yaitu kemampuan manusia untuk memulai sesuatu yang baru (*natality*) dan menciptakan makna bersama melalui dialog.

Artikulasi *Ens Rationale* dan Krisis Rasionalitas Modern

Konsep *ens rationale* merujuk pada kapasitas unik manusia untuk berpikir rasional, yang dalam tradisi filosofis Barat telah menjadi pembeda fundamental antara manusia dan makhluk lainnya. Aristoteles mengidentifikasi rasionalitas (*logos*) sebagai fungsi jiwa yang paling tinggi, yang memungkinkan manusia untuk melampaui tingkat vegetatif dan sensitif menuju kehidupan intelektual dan moral.¹⁰

Immanuel Kant mengembangkan pemahaman ini dengan menekankan otonomi rasional sebagai dasar martabat manusia. Dalam *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, Kant berargumen bahwa rasionalitas praktis memungkinkan manusia untuk bertindak berdasarkan

⁶ Aristotle, *Politics*, trans. Ernest Barker (Oxford: Oxford University Press, 1995): 1253a.

⁷ *Ibid.*: 1254b-1255a.

⁸ Arendt, *The Human Condition*: 198-199.

⁹ *Ibid.*: 256-257.

¹⁰ Aristotle, *Nicomachean Ethics*: 1098a7-20.

prinsip moral universal, bukan sekadar dorongan empiris atau kepentingan partikular.¹¹ Konsep *categorical imperative* Kant mencerminkan keyakinannya bahwa rasionalitas adalah fondasi etika universal. Namun, proyek rasionalitas Pencerahan (*aufklärung*) menghadapi kritik serius dari berbagai pemikir modern dan postmodern. Max Weber mengidentifikasi fenomena ‘rasionalisasi’ (*rationalization*) sebagai proses yang paradoksnya justru menghasilkan ‘iron cage’ yang membatasi kebebasan manusia.¹² Weber menunjukkan bahwa rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*) telah mendominasi rasionalitas nilai (*value rationality*), sehingga efisiensi teknis menggantikan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan.

Theodor Adorno dan Max Horkheimer dalam *Dialectic of Enlightenment* mengeksplorasi bagaimana rasionalitas Pencerahan mengandung benih-benih penghancurannya sendiri.¹³ Mereka berargumen bahwa rasionalitas instrumental yang menjadi ciri khas modernitas telah berubah menjadi bentuk dominasi baru yang tidak kalah totalitariannya dengan mitos-mitos pramodern yang hendak dilampauinya.

Manifestasi Kemosrotan Etis-Rasional dalam Politik Kontemporer

Kemosrotan etis-rasional dalam politik kontemporer termanifestasi dalam berbagai fenomena yang saling terkait. *Pertama*, munculnya politik post-truth yang dicirikan oleh pengabaian terhadap fakta objektif dan dominasi narasi emosional dalam discourse publik.¹⁴ Fenomena ini menunjukkan erosi kepercayaan terhadap epistemologi rasional yang menjadi dasar legitimasi politik modern.

Kedua, polarisasi ekstrem yang menghancurkan kemungkinan dialog rasional antarkelompok masyarakat. Polarisasi ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga epistemologis, di mana kelompok-kelompok berbeda menggunakan framework interpretatif yang sama sekali tidak dapat dikomunikasikan satu sama lain.¹⁵ Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai ‘parallel realities’ yang menghambat deliberasi demokratis.

Ketiga, teknokratisasi politik yang mereduksi pengambilan keputusan publik menjadi kalkulasi teknis semata, tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan makna politik yang lebih luas.¹⁶ Teknokratisasi ini, meskipun mengklaim rasionalitas, justru menghasilkan depolitisasi yang bertentangan dengan esensi manusia sebagai *ens politicon*.

Keempat, populisme yang memanfaatkan frustrasi masyarakat terhadap elit rasional untuk membangun legitimasi berdasarkan emosi dan identitas primordial, bukan argumentasi rasional.¹⁷ Populisme mencerminkan crisis of representation dalam demokrasi liberal, di mana institusi-institusi rasional gagal memediasi antara aspirasi populer dan kebijakan publik.

Dialektika Ens Politicon dan Ens Rationale

Relasi antara dimensi politik dan rasional manusia bukanlah relasi yang harmonis, tetapi bersifat dialektis dan penuh ketegangan. Di satu sisi, politik membutuhkan rasionalitas sebagai

¹¹ Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997): 421.

¹² Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trans. Peter Baehr and Gordon C. Wells (London: Penguin Classics, 2002): 123-125.

¹³ Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, *Dialectic of Enlightenment* (Stanford: Stanford University Press, 2002): 1-34.

¹⁴ Chantal Mouffe, “Democracy, Power, and the Political”, *Democracy and Difference* 3, no. 1 (1996): 245-256.

¹⁵ James Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”, *Journal of Political Philosophy* 6, no. 4 (1998): 400-425.

¹⁶ Haryatmoko, “Etika Politik dan Kekuasaan”, *Basis* 51, no. 11-12 (2002): 4-15.

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, “Demokrasi dan Martabat Manusia”, *Driyarkara* 25, no. 3 (2000): 58-74.

basis legitimasi dan efektivitas. Di sisi lain, rasionalitas membutuhkan ruang politik sebagai arena aktualisasi dan pengujian.¹⁸

Aristoteles telah mengantisipasi ketegangan ini melalui konsep *phronesis* (kebijaksanaan praktis) yang menjembatani antara pengetahuan teoretis (*episteme*) dan tindakan konkret dalam situasi politik yang kompleks.¹⁹ *Phronesis* bukanlah aplikasi mekanis prinsip-prinsip abstract, tetapi kemampuan untuk menilai situasi partikular dengan mempertimbangkan konteks, tujuan, dan konsekuensi tindakan.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* mencoba merekonstruksi hubungan antara rasionalitas dan politik melalui konsep *original position* dan *veil of ignorance*.²⁰ Rawls berargumen bahwa prinsip-prinsip keadilan yang rasional dapat diturunkan melalui prosedur hipotetis yang mengeliminasi bias partikular. Namun, pendekatan Rawls menghadapi kritik kaum komunitarian yang berargumen bahwa rasionalitas tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan tradisi moral tertentu.

Jürgen Habermas menawarkan sintesis yang lebih sophisticated melalui teori tindakan komunikatif yang membedakan antara rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*) dan rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*).²¹ Rasionalitas komunikatif memungkinkan koordinasi tindakan melalui dialog yang berorientasi pada pencapaian pemahaman (*understanding*), bukan sekadar kesuksesan strategis.

Kemungkinan Rekonsiliasi: Menuju Politik Rasional-Etis

Rekonsiliasi antara *ens politicon* dan *ens rationale* membutuhkan rekonseptualisasi fundamental tentang rasionalitas dan politik. *Pertama*, diperlukan pemahaman rasionalitas yang tidak tereduksi pada kalkulasi instrumental, tetapi mencakup dimensi komunikatif, hermeneutik, dan praktis.²² Rasionalitas dalam konteks politik harus dipahami sebagai kapasitas untuk terlibat dalam dialog yang *genuine* dengan pihak lain, bukan sekadar kemampuan untuk mencapai tujuan secara efisien.

Kedua, politik harus dipahami kembali dalam pengertian Aristotelian sebagai arena aktualisasi kebijaksanaan praktis dan pencapaian kehidupan yang baik bersama, bukan sekadar mekanisme agregasi preferensi individual atau arena kompetisi kekuasaan.²³ Ini membutuhkan revitalisasi konsep *common good* yang telah tergerus dalam individualisme liberal.

Ketiga, institusi-institusi politik perlu direformasi untuk memfasilitasi deliberasi rasional yang *genuine*. Ini mencakup reformasi sistem pendidikan untuk mengembangkan kapasitas kritis warga negara, reformasi media untuk mendukung discourse publik yang berkualitas, dan reformasi prosedur politik untuk memberikan ruang bagi argumentasi dan deliberasi.²⁴

Alasdair MacIntyre dalam *After Virtue* berargumen bahwa *recovery of virtue ethics* menjadi krusial untuk mengatasi krisis moral modernitas.²⁵ MacIntyre menekankan pentingnya tradisi-tradisi moral yang hidup (*living traditions*) sebagai konteks di mana rasionalitas praktis

¹⁸ F. Budi Hardiman, "Ruang Publik dan Demokrasi: Perspektif Habermas", *Jurnal Filsafat* 18, no. 2 (1994): 24-37.

¹⁹ Aristotle, *Nicomachean Ethics*: 1140a24-1140b30.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971): 136-142.

²¹ Habermas, *The Theory of Communicative Action*, vol. 2: 119-152

²² Mudji Sutrisno, "Politik sebagai Panggilan: Refleksi atas Pemikiran Hannah Arendt", *Orientasi Baru* 12, no. 2 (2001): 167-184.

²³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999): 78-85

²⁴ Amy Gutmann and Dennis Thompson, "Deliberative Democracy Beyond Process", *Journal of Political Philosophy* 10, no. 2 (2002): 153-174.

²⁵ Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 3rd ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007): 181-203.

dapat berkembang. Namun, pendekatan MacIntyre menghadapi tantangan dalam konteks pluralisme modern di mana berbagai tradisi moral harus hidup berdampingan.

Charles Taylor menawarkan perspektif yang lebih sensitif terhadap pluralisme melalui konsep *significant others* dan *dialogical self*.²⁶ Taylor berargumen bahwa identitas manusia terbentuk melalui dialog dengan tradisi dan komunitas, sehingga rasionalitas tidak dapat dipisahkan dari konstitusi sosial subjek. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa legitimasi tidak dapat dicapai melalui prosedur formal semata, tetapi membutuhkan pengakuan terhadap keragaman identitas dan nilai dalam masyarakat.

Implikasi untuk Demokrasi Kontemporer

Rekonsiliasi antara *ens politicon* dan *ens rationale* memiliki implikasi penting untuk reformasi demokrasi kontemporer. *Pertama*, demokrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai metode untuk mencapai preferensi mayoritas, tetapi harus dipahami sebagai cara hidup (*way of life*) yang memungkinkan warga negara untuk berkembang sebagai makhluk politik dan rasional.²⁷

Kedua, pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) perlu direorientasi dari transmisi informasi tentang sistem politik menjadi pengembangan kapasitas deliberatif dan kemampuan untuk terlibat dalam dialogue publik yang *constructive*.²⁸ Ini mencakup pengembangan kemampuan *critical thinking*, empati, dan kemampuan untuk memahami perspektif yang berbeda.

Ketiga, teknologi informasi perlu diatur sedemikian rupa sehingga mendukung, bukan menghambat, deliberasi rasional. Algoritma media sosial yang menciptakan *echo chambers* dan mempolarisasi opini publik perlu direformasi untuk mendorong exposure terhadap perspektif yang beragam.²⁹

Keempat, institusi-institusi *intermediary* seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media massa perlu diperkuat perannya sebagai mediator antara warga negara individual dan sistem politik yang kompleks. Institusi-institusi ini berperan penting dalam mentranslasikan aspirasi particular menjadi kepentingan umum melalui proses deliberatif.³⁰

D. Kesimpulan

Analisis terhadap dialektika antara *ens politicon* dan *ens rationale* dalam menghadapi kemerosotan etis-rasional menunjukkan bahwa krisis kontemporer bukan semata-mata krisis institusional atau prosedural, tetapi krisis yang menyentuh hakikat fundamental manusia sebagai makhluk politik dan rasional. Kemerosotan etis-rasional yang termanifestasi dalam politik post-truth, polarisasi ekstrem, teknokratisasi, dan populisme mencerminkan kegagalan modernitas dalam mempertahankan keseimbangan antara rasionalitas dan politik.

Rekonsiliasi antara kedua dimensi fundamental manusia ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan multidimensional. *Pertama*, diperlukan rekonseptualisasi rasionalitas yang tidak terbatas pada rasionalitas instrumental, tetapi mencakup rasionalitas komunikatif, praktis, dan hermeneutik. *Kedua*, politik perlu dipulihkan dalam pengertian klasiknya sebagai arena aktualisasi kebijaksanaan praktis dan pencapaian kebaikan bersama.

²⁶ Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989): 35-52.

²⁷ Mark E. Warren, "What Can Democratic Participation Mean Today?", *Political Theory* 30, no. 5 (2002): 677-701.

²⁸ Francis Wahono, "Kapitalisme dan Demokrasi: Sebuah Kritik", *Prisma* 29, no. 4 (2000): 23-35.

²⁹ John Keane, "Structural Transformations of the Public Sphere", *The Communication Review* 1, no. 1 (1995): 1-22.

³⁰ Zainal Abidin Bagir, "Pluralisme dan Ruang Publik", *Islamika* 2, no. 3 (1995): 45-58.

Ketiga, institusi-institusi politik dan sosial perlu direformasi untuk memfasilitasi deliberasi rasional yang genuine. Ini mencakup reformasi sistem pendidikan, media, dan prosedur politik untuk memberikan ruang bagi dialog yang constructive dan pengembangan kapasitas kritis warga negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis kontemporer tidak dapat dicapai melalui dominasi salah satu dimensi atas yang lain—baik rasionalitas teknis atas politik maupun sebaliknya—tetapi melalui sintesis dialektis yang memungkinkan keduanya untuk saling memperkaya dan membatasi. Kebijakan praktis (*phronesis*) Aristotelian dan rasionalitas komunikatif Habermasian menawarkan kerangka konseptual yang promising untuk sintesis tersebut.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya revitalisasi pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas deliberatif, reformasi institusi-institusi politik untuk mendukung partisipasi yang meaningful, dan pengembangan ruang publik yang memungkinkan dialog yang genuine antara berbagai kelompok masyarakat.

Recovery dari kemosotan etis-rasional membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan, karena melibatkan perubahan fundamental dalam cara manusia modern memahami dirinya sebagai makhluk politik dan rasional. Namun, tanpa upaya *recovery* ini, peradaban modern akan terus mengalami krisis legitimasi yang semakin dalam.

Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Aristotle. *Politics*. Translated by Ernest Barker. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Bagir, Zainal Abidin. "Pluralisme dan Ruang Publik." *Islamika* 2, no. 3 (1995): 45-58.
- Bohman, James. "The Coming of Age of Deliberative Democracy." *Journal of Political Philosophy* 6, no. 4 (1998): 400-425.
- Gutmann, Amy and Dennis Thompson. "Deliberative Democracy Beyond Process." *Journal of Political Philosophy* 10, no. 2 (2002): 153-174.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*. 2 vols. Boston: Beacon Press, 1984.
- Hardiman, F. Budi, "Ruang Publik dan Demokrasi: Perspektif Habermas", *Jurnal Filsafat* 18, no. 2 (1994): 24-37.
- . *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Haryatmoko. "Etika Politik dan Kekuasaan." *Basis* 51, no. 11-12 (2002): 4-15.
- Horkheimer, Max and Theodor W. Adorno. *Dialectic of Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- Kant, Immanuel. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Keane, John. "Structural Transformations of the Public Sphere." *The Communication Review* 1, no. 1 (1995): 1-22.
- MacIntyre, Alasdair. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. 3rd ed. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007.

- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- "Demokrasi dan Martabat Manusia", *Driyarkara* 25, no. 3 (2000): 58-74.
- Mouffe, Chantal. "Democracy, Power, and the 'Political.'" *Democracy and Difference* 3, no. 1 (1996): 245-256.
- Sutrisno, Mudji. "Politik sebagai Panggilan: Refleksi atas Pemikiran Hannah Arendt." *Orientasi Baru* 12, no. 2 (2001): 167-184.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
- Wahono, Francis. "Kapitalisme dan Demokrasi: Sebuah Kritik." *Prisma* 29, no. 4 (2000): 23-35.
- Warren, Mark E. "What Can Democratic Participation Mean Today?" *Political Theory* 30, no. 5 (2002): 677-701.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Translated by Peter Baehr and Gordon C. Wells. London: Penguin Classics, 2002.